

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara yang menjadi acuan dalam membangun Negara untuk mencapai salah satu tujuan yang terdapat dalam Pancasila yaitu sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” bahwa salah satu tujuan negara adalah menciptakan rasa keadilan dimasyarakat. Tingkat perkembangan kasus yang terjadi dimasyarakat saat ini sangatlah meningkat dan setiap yang bersengketa membawa kasus mereka pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang sifatnya perdata sehingga menyebabkan penumpukan perkara pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Konflik berasal dari kata bahasa Inggris *conflict*, yang berarti persengketaan, perselisihan, percekocan atau pertentangan. Konflik atau persengketaan tentang sesuatu terjadi antara dua pihak atau lebih. Konflik atau perselisihan nyaris tidak terpisah dari kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga sulitlah membayangkan masyarakat tanpa konflik. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesai sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan.¹ Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan

¹ Gatot Soemartono, “*Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*”, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 4.

dasarnya dalam memandang konflik itu sendiri. Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui *litigasi*, *non litigasi* maupun *advokasi*. Proses *litigasi* cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya *win-lose*, tidak responsif.²

Mekanisme *litigasi* dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki iktikad baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Keputusan yang dihasilkan bersifat memaksa, Sedangkan mekanisme *non litigasi* dipilih apabila terdapat kepentingan para pihak yang harus dilindungi dihadapan publik dan sifatnya perdata dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-masing pihak untuk berdamai dan memusyawarahkan kasusnya. Sedangkan *advokasi* dapat digunakan untuk konflik atau sengketa di masyarakat yang tidak sekedar pada masalah perebutan hak dan kepastian semata. Misalnya konflik perburuhan, pertanahan, lingkungan hidup, perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan (*trafficking*).³

Secara garis besar *litigasi* dilakukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama, sedangkan *non litigasi* bisa diselesaikan melalui arbitrase dan alternarif penyelesaian sengketa yaitu dengan negosisasi, konsiliasi dan juga mediasi, sedangkan *advokasi* lebih kepada kepentingan umum.

² Hendra winata, "*Hukum Penyelesaian Sengketa*", Sinar Grafika", Jakarta, 2012, hlm. 9.

³ Rachmat syafa'at, "*Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*", Agritek YPN Malang, Malang, 2006, hlm. 33-34.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.⁴

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara untuk penggugat, atau dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi untuk tergugat. Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

⁴ *digilib.uinsby.ac.id*, diakses pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 pukul 16.30 WIB.

Tabel 1: Data Perkara Waris di Pengadilan Negeri Pati.

No	Tahun	Jumlah Perkara Waris	Yang berhasil dimediasi
1	2016	2	Tidak ada
2	2017	3	1
3	2018	5	Tidak ada

Karena meningkatnya sengketa waris di Pengadilan Negeri pati maka diharapkan proses mediasi mampu menekan gugatan sengketa waris di Pengadilan Negeri Pati.

Sebagai contoh dalam kasus sengketa tanah waris yang berhasil diselesaikan secara mediasi oleh hakim Pengadilan Negeri Pati dengan para penggugat C.K.Lilyana Purnomowati, F.X.Y. Andri Hayrianto dan M.E. Henny Widyawati dengan para tergugat Bambang Hariyanto dkk.Objek gugatan sebidang tanah. Hal ini berawal ketika para tergugat meminjam tanah kepada ST.Y POEDJO HAYRIANTO yaitu ayah dari C.K.Lilyana dan Purnomowati F.X.Y. Andri Hayrianto juga merupakan suami M.E. Henny Widyawati. Bahwa sewaktu ST. Y POEDJO HAYRIANTO masih hidup, para tergugat datang kepada alm. ST. Y POEDJO HAYRIANTO dan meminta izin untuk dapat menggunakan tanah tersebut (*dunung*) oleh karena para tergugat tidak memiliki tanah untuk dijadikan tempat tinggal. Permintaan para tergugat tersebut dikabulkan dengan syarat:

- a) Tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan permanen,
- b) Sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemilik harus diserahkan dan
- c) Batas waktu pemakaian berakhir pada waktu meninggalnya ST. Y POEDJO HAYRIANTO.

Syarat-syarat tersebut disanggupi oleh para tergugat. Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2011, ayah Penggugat I dan Penggugat II dan yang juga suami Penggugat III yang bernama ST. Y POEDJO HAYRIANTO meninggal dunia, setelah ST. Y POEDJO HAYRIANTO meninggal dunia.

Para penggugat berusaha untuk meminta tanah Objek Sengketa kepada para tergugat secara baik-baik untuk menyerahkannya, akan tetapi atas permintaan ini justru mendapatkan penolakan dari para tergugat dengan alasan telah mendapat ijin dari Alm ST. Y POEDJO HAYRIANTO, para tergugat justru merobohkan bangunan semi permanen dan membangunya menjadi bangunan permanen diatas tanah objek sengketa dengan dua bangunan permanen. Para penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan, tetapi usaha para penggugat tersebut selalu tidak berhasil. Justru para tergugat selalu menolak dan sulit untuk ditemui, para penggugat juga sudah men-somasi berkali-kali namun tidak berhasil, oleh karena itu tidak ada jalan lain para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pati.

Beranjak dari uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut, dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Di Pengadilan Negeri Pati”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris secara mediasi di Pengadilan Negeri Pati?
2. Bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah waris di Pengadilan Negeri Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian mediasi terhadap sengketa tanah waris di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui peran mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah waris di Pengadilan Negeri Pati.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa sesuai peraturan-peraturanyang berlaku.
 - b. Memperkaya referensi penulisan tentang hukum perdata.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis yang berhubungan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa waris.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang menghadapi permasalahan mediasi di Pengadilan Negeri pati.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Ahli Waris, Pelaksanaan Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara garis besar, dan Peran Mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian mediasi di Pengadilan Negeri Pati, pelaksanaannya dan dianalisis dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

